



SKPD Tak Serahkan Dokumen Anggaran

Ancaman Pencopotan Jabatan Tak Digubris

MELEWATI batas waktu penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah terlampaui. Namun ratusan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) belum menyerahkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta.

Padahal Kepala BPKAD mengancam akan memcopot jabatan para kepala SKPD yang tak menyerahkan DPA sesuai jadwal yang telah ditetapkan, kemarin (5/5). Dari sebanyak 700 SKPD dan UKPD di Pemprov DKI, baru 68 saja yang sudah menyerahkan. Sementara 632 sisanya belum kunjung memenuhi permintaan BPKAD. "Data sementara baru ada 68 SKPD dan UKPD. Tapi masih terus jalan," ujar Heru, di Balaikota DKI Jakarta, kemarin

Dia mengungkapkan, sanksi tegas telah menanti bagi kepala SKPD dan UKPD yang terlambat menyerahkan DPA. Karena DPA adalah syarat untuk pencairan anggaran yang telah disahkan pada April 2015. "Sanksinya kan kemarin sudah ditegaskan kepala SKPD dan UKPD akan distafkan jika terlambat," tegas Heru.

Terkait dengan batas waktu penyerahan DPA, Heru menegaskan, tidak akan memperpanjangnya. Sebab pihak SKPD dan UKPD telah memiliki banyak waktu saat proses APBD berlangsung. "Kami tidak akan perpanjang. Batas akhirnya ya hari ini (kemarin)," kata dia.

Menanggapi hal itu, Direktur Pusat

Pengkajian Jakarta, Muhlis Ali Imron, mengatakan, lambatnya para SKPD dan UKPD dalam menyerahkan DPA bukti mereka bekerja setengah hati. Sehingga terkesan malas-malasan menjalankan program.

Sebanyak 68 SKPD dan UKPD yang telah menyerahkan DPA, yakni Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kecamatan Cempaka Putih, Kecamatan Pademangan, Kecamatan Sawah Besar, Kelurahan Pulau Harapan, Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kelurahan Cijantung, Kelurahan Makasar, Kelurahan Jembatan Lima, Kelurahan Cilincing, Kelurahan Pekojan

Termasuk juga Kelurahan Semanan, Kelurahan Krendang, Kelurahan Mangga Besar, Kelurahan Cempaka Baru, Kelurahan Kali Anyar, Kelurahan Gelora, Kelurahan Duri Kosambi, Kelurahan Kebon Kosong, Kelurahan Tangki, Kelurahan Duri Pulo, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kelurahan Tebet Timur, Kelurahan Lenteng Agung.

Menanggapi kondisi tersebut, Direktur Pusat Pengkajian Jakarta (PPJ) Muhlis Ali Imron mengatakan, lambatnya SKPD dan UKPD menyerahkan DPA sebagai bukti mereka bekerja setengah hati.

Bahkan Muhlis beranggapan bahwa ratusan instansi itu berada dalam tekanan. Akibatnya, ancaman jika mereka melakukan kesalahan dalam menyusun DPA. "Harusnya pimpinan pemprov tidak serta merta menyalahkan SKPD dan UKPD ini," pungkas dia. **(wok)**



- Dinas Dukcapil
- Dinas KUMKMP
- Satpol PP
- Kabupaten Kepulauan Seribu
- BPAD
- Biro KDH KLN
- Biro Adm Keuangan dan Aset
- Biro Dikmental
- KPP Jakarta Barat
- KPMP Kepulauan Seribu
- KPMP Jakarta Pusat
- Kantor Pengelola Monas
- KPKD Jakarta Pusat
- KPAK Jakarta Utara
- KLH Jakarta Utara
- KLH Jakarta Pusat
- Sudin Olahraga Jakarta Timur
- Sudin Perindustrian Jakarta Pusat
- Sudin Perhubungan Jakarta Utara
- Sudin Kominfo Jakarta Pusat
- RSUD Kepulauan Seribu
- Puskesmas Kepulauan Seribu Utara
- Puskesmas Kepulauan Seribu Selatan
- Puskesmas Tanjung Priok
- Puskesmas Senen
- Puskesmas Matraman
- Puskesmas Cakung
- Puskesmas Kebon Jeruk
- Puskesmas Setia Budi
- Puskesmas Pesanggrahan

GIMBALINDOPOS